



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT PRESIDEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIKA KISWARDANI
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ISTANA
3. NHK : 165545

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	475.260.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m <sup>2</sup> /59 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 475.260.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	428.500.000
1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, WARISAN Rp. 1.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
3. MOTOR, HONDA C1MO2N42LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	132.650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.642.240.184
F. HARTA LAINNYA	Rp.	518.000.000
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.196.650.184</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.196.650.184</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.